

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dipaparkan beberapa literatur terkait penelitian ini, seperti definisi lahan dalam konteks lingkungan, daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan, satuan kemampuan lahan, bencana, bencana banjir, kerentanan, hubungan, serta sintesis literatur yang digunakan pada penelitian ini.

2.1 Definisi Lahan dalam Konteks Lingkungan

Lahan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan dikarenakan lahan itu sendiri memiliki posisi sebagai salah satu komponen pendukung dari daya dukung lingkungan (Inkantriani, 2008). Lingkungan tentu memiliki keterikatan dengan lahan, dikarenakan lahan merupakan salah satu komponen penting dalam lingkungan sebagai penunjang ekosistem yang ada di dalamnya. Menurut Mega, dkk. (2010) dalam bukunya, lahan memiliki pengertian sebagai bagian bentang alam (*landscape*) yang mencakup pengertian tanah, lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi dan vegetasi yang menutupinya, yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Selain itu, disebutkan juga sebuah pengertian yang menyebutkan bahwa lahan merupakan salah satu komponen abiotik lingkungan utama yang merupakan matriks dasar kehidupan (Tan, 2009) dalam Widiatmaka, dkk. (2015).

2.2 Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan

Konsep mengenai daya dukung telah ada dan tertulis pada hukum perencanaan tata ruang Indonesia yang sebagian besar memiliki hubungan dengan isu lingkungan di dalamnya (Rahadi, dkk., 2015). Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan merupakan kemampuan yang dimiliki lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya dukung

lingkungan adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi di mana jumlah populasi tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada, sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamannya (Soerjani, dkk., 1987) dalam Puspitasari (2011). Daya dukung dan daya tampung sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup, serta menjaga fungsi lingkungan hidup sebagai penyedia sumber daya alam (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo, 2018). Daya dukung tidak selalu tetap, melainkan akan terjadi perkembangan sesuai dengan waktu, dan perkembangan tersebut dapat dipengaruhi oleh teknik-teknik manajemen dan pengontrolan (Saveriades, 2000). Daya dukung yang dimiliki oleh suatu wilayah tidak akan bersifat statis, tetapi akan bervariasi menyesuaikan kondisi biogeofisik/ekologis wilayah tersebut dan juga akan menyesuaikan kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam dari wilayah tersebut (Sudanti, 2012).

Untuk melihat kemampuan lahan di suatu daerah, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu evaluasi daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan. Melalui evaluasi berbasis kemampuan lahan tersebut, perencanaan penggunaan lahan dapat diarahkan agar lahan dapat digunakan sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemanfaatan dapat diarahkan sesuai daya dukungnya (Sharififar dkk., 2013) dalam Widiatmaka, dkk. (2015). Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, kemampuan lahan adalah karakteristik yang dimiliki oleh lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lainnya yang bertujuan untuk mendukung kehidupan maupun kegiatan yang ada pada suatu lahan maupun suatu daerah.

Selain itu, menurut Karim (2014) dalam jurnalnya disebutkan bahwa kemampuan lahan adalah pengelompokan jenis-jenis lahan ke dalam satuan-satuan tertentu berdasarkan tingkat kemampuannya untuk dapat mengetahui penggunaan yang paling intensif dan perlakuan yang diperlukan untuk dapat digunakan secara terus menerus. Komponen yang diperlukan dalam menganalisis kemampuan lahan

yaitu menggunakan 9 buah analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL), yang diantaranya adalah SKL Morfologi, SKL Kemudahan Dikerjakan, SKL Kestabilan Lereng, SKL Kestabilan Pondasi, SKL Ketersediaan Air, SKL Untuk Drainase, SKL Terhadap Erosi, SKL Pembuangan Limbah, dan SKL Terhadap Bencana Alam yang bersumber pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.

2.3 Satuan Kemampuan Lahan (SKL)

Menurut peraturan pemerintah, untuk daya dukung lahan dapat dilihat dengan cara mengetahui kemampuan lahan di wilayah penelitian yang dilakukan dengan cara pembobotan Satuan Kemampuan Lahan (SKL) yang bersumber pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Maria, dkk., 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wirawan, dkk. (2019), penentuan daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan juga menggunakan analisis SKL yang merupakan salah satu metode yang digunakan pada penelitian tersebut.

Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) tersebut terdiri dari:

- 1) SKL Morfologi, untuk memilah bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya.
- 2) SKL Kemudahan Dikerjakan, untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah dan/atau kawasan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/ pengembangan kawasan.
- 3) SKL Kestabilan Lereng, untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah/ kawasan pengembangan dalam menerima beban.
- 4) SKL Kestabilan Pondasi, untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan.

- 5) SKL Ketersediaan Air, untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada masing-masing tingkatan, guna pengembangan kawasan.
- 6) SKL Untuk Drainase, untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam memutuskan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal ataupun meluas dapat dihindari.
- 7) SKL Terhadap Erosi, untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antisipasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir.
- 8) SKL Pembuangan Limbah, untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair.
- 9) SKL Terhadap Bencana Alam, untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam untuk menghindari/mengurangi kerugian dan korban akibat bencana tersebut.

2.4 **Bencana**

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam diantaranya adalah banjir, gempa bumi, kekeringan, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan angin puting beliung. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh faktor non alam diantaranya adalah kegagalan teknologi, wabah penyakit, bencana biologis, dan kecelakaan lalu lintas. Menurut Khambali (2017) pada bukunya yang berjudul Manajemen Penanggulangan Bencana, dikatakan bahwa bencana alam merupakan suatu konsekuensi yang timbul dari kombinasi aktivitas alami, baik berupa peristiwa fisik maupun aktivitas manusia. Dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Pesisir (Studi Kasus Kelurahan Banten dan

Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten; Desa Purwerejo, Desa Morodemak, Desa Surodadi dan Desa Timbulsloko, Kabupaten Demak, Jawa Tengah), disebutkan bahwa suatu bencana dapat terjadi secara tiba-tiba ataupun dapat berlangsung dengan serangkaian proses tertentu yang terjadi secara bertahap perlahan demi perlahan. Selain itu, disebutkan juga bahwa daya dukung lingkungan yang mengalami penurunan juga akan semakin meningkatkan terjadinya risiko bencana, terutama pada kalangan yang memiliki kerentanan bencana yang tinggi, baik dari segi sosial, fisik, ekonomi, maupun ekologi.

Perlu kita ketahui bahwa sebuah kejadian baik faktor alam maupun faktor non alam bukanlah dianggap bencana pada saat kejadian tersebut terjadi, tetapi terhitung dari konsekuensi dari bahaya yang akan terjadi (Coppola, 2007). Frekuensi pada bencana juga dapat terjadi dan disebabkan oleh beberapa hal, seperti pola iklim, tektonik lempeng, maupun sistem alami lainnya. Peningkatan bencana tersebut dapat menjadi penyebab peningkatan bahaya yang terjadi pada suatu kejadian (Coppola, 2007).

2.5 Bencana Banjir

Bencana banjir merupakan salah satu bencana yang menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Menurut Pemani, dkk. (2019), bencana banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Bencana banjir dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam, seperti aktivitas manusia. Salah satu aktivitas manusia yang dapat menyebabkan banjir yaitu perubahan kondisi DAS seperti penggundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan tata guna lainnya dapat memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran banjir. Dari persamaan-persamaan yang ada, perubahan tata guna lahan berkontribusi besar terhadap naiknya kuantitas dan kualitas banjir. Dalam kasus banjir, suatu daerah dianggap rawan bila daerah itu biasanya dan diperkirakan akan terlanda luapan air dengan dampak-dampak negatifnya, penilaian ini didasarkan pada sejarah banjir dan kondisi daerahnya (Sebastian, 2008). Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh banjir dapat berupa kerugian harta benda penduduk serta dapat pula menimbulkan korban jiwa. Dikatakan banjir apabila terjadi luapan air yang disebabkan oleh

kurangnya kapasitas penampang saluran. Banjir pada bagian hulu biasanya memiliki arus yang deras, daya gerusnya besar, tetapi durasinya pendek. Sedangkan pada bagian hilir arusnya tidak deras (karena landai), tetapi durasi banjir yang terjadi panjang (A. & Wibowo, 2010).

Menurut Wismarini & Sukur (2015), banjir didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana air dalam suatu saluran pembuangan tidak dapat tertampung atau dapat pula terjadi hambatan pada aliran air di dalam saluran pembuangan tersebut. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: P.04/V-SET/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai, banjir dapat pula diartikan sebagai debit aliran sungai yang secara relatif lebih besar dari biasanya akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga air limpasan tidak dapat ditampung oleh alur/palung sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain (Sebastian, 2008).

Pada buku Manajemen Penanggulangan Bencana, Khambali (2017) mendefinisikan banjir sebagai bencana yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan tersedianya saluran-saluran pembuangan yang memadai, sehingga mengakibatkan terendamnya wilayah-wilayah tertentu. Selain itu dalam buku tersebut disebutkan juga bahwa beberapa penyebab terjadinya bencana banjir, diantaranya yaitu penebangan hutan secara liar tanpa adanya reboisasi, pendangkalan sungai, pembuangan sampah yang sembarangan, pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat, pembuatan tanggul yang kurang baik, dan air laut, sungai, ataupun danau yang meluap dan menggenangi daratan di sekitarnya (Khambali, 2017). Banjir yang terjadi di kawasan perkotaan dapat berupa genangan lokal yang terjadi pada saat musim hujan, skala banjir yang terjadi cukup besar di perkotaan dan belum dapat dikendalikan secara dominan membutuhkan strategi-strategi penanganan yang menyeluruh dan *multi stakeholders* (Sebastian, 2008).

Menurut Muchlis (2017), banjir di Indonesia pada umumnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu banjir sebagai akibat meluapnya sungai, banjir

lokal, dan banjir yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Banjir sebagai akibat meluapnya sungai terjadi karena kapasitas saluran ataupun sungai tidak mampu menampung banyaknya air yang ada sehingga menyebabkan air meluap keluar melewati tanggul sungai, daerah yang terkena dampak pada jenis banjir ini biasanya adalah daerah di sekitar (kanan/kiri) sungai yang letaknya cukup rendah atau dapat disebut sebagai dataran banjir. Banjir lokal adalah banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan dalam periode waktu tertentu yang menggenangi daerah-daerah yang relatif rendah dan memiliki kelembaban tanah yang tinggi sehingga pada waktu terjadi hujan lebat dalam waktu yang cukup lama, peresapan air ke dalam tanah sangat kecil. Untuk banjir yang disebabkan oleh pasang surut air laut terjadi pada dataran pantai yang letaknya cukup rendah atau dapat berupa cekungan dan juga terdapat muara sungai dengan anak-anak sungainya, sehingga jika terjadi pasang dari laut atau rob maka air laut atau air sungai akan menggenangi daerah tersebut, jenis banjir ini tidak disebabkan oleh air hujan, sehingga selain pada musim hujan, banjir ini dapat saja terjadi pada musim kemarau. Selain itu, pada kawasan perkotaan, banjir dapat disebabkan oleh kawasan kumuh di sepanjang bantaran sungai yang ditambah dengan pembuangan sampah yang langsung ke alur sungai, sehingga dapat meninggikan muka air banjir karena disebabkan oleh terhalangnya aliran air di sungai (Sebastian, 2008).

2.6 Kerentanan

Menurut Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Bandar Lampung 2016 – 2020, kerentanan merupakan kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Kerentanan disusun berdasarkan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar diperoleh dari komponen sosial budaya. Sedangkan indeks kerugian diperoleh dari komponen fisik, ekonomi dan lingkungan. Komponen sosial budaya ditentukan berdasarkan parameter kepadatan penduduk dan penduduk kelompok rentan (rasio jenis kelamin, kelompok umur rentan, penduduk miskin dan penduduk cacat). Selain itu, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim disebutkan bahwa kerentanan

merupakan kecenderungan pada sebuah sistem untuk mengalami dampak negatif, di mana dampak negatif tersebut meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas adaptasi untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kerentanan didefinisikan sebagai suatu kondisi biologis, lingkungan, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi pada suatu lapisan masyarakat serta kondisi fisik geografis alam di suatu wilayah tertentu untuk waktu tertentu yang mengurangi kemampuan suatu masyarakat dalam upaya mencegah, meredam, kesiapan, dan menanggapi dampak dari suatu kejadian tertentu. Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim juga menjelaskan mengenai pengertian dari kerentanan, di mana kerentanan merupakan kecenderungan yang terjadi pada suatu sistem untuk mengalami dampak negatif yang meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas adaptasi untuk mengatasi dampak negatif.

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa kerentanan merupakan sebuah kondisi atau kecenderungan yang dapat berlaku untuk individu, kelompok individu, atau masyarakat, yang menyebabkan masyarakat tersebut tidak mampu menghadapi bencana. Dalam Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, disebutkan bahwa kerentanan merupakan suatu kondisi yang berasal dari beberapa masyarakat yang membentuk suatu komunitas yang mengalami atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman dari suatu bencana. Selain itu, Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana juga menyebutkan bahwa kerentanan dapat didefinisikan sebagai aset-aset yang terekspos termasuk diantaranya kehidupan manusia (kerentanan sosial), wilayah ekonomi, struktur fisik dan wilayah ekologi/lingkungan, dan masing-masing aset memiliki sensitivitas sendiri, yang bervariasi yang dilihat dari jenis bencana yang terjadi dan juga dari besarnya intensitas bencana tersebut. Kerentanan dapat dikaitkan dengan kemampuan dari individu atau sekelompok individu untuk melindungi dirinya serta kemampuan untuk menanggulangi dirinya dari dampak bahaya/bencana alam tanpa bantuan dari luar (Hapsoro & Buchori,

2015). Pada bencana banjir, kerentanan terhadap masyarakat akan meningkat apabila banyaknya masyarakat yang menghuni bantaran sungai (Jaswadi, dkk., 2012).

2.7 Hubungan

Menurut Tams Jayakusuma (2001) dalam Erwin (2020) hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat ataupun dampak kepada kegiatan yang lainnya. Menurut Wibowo (2019) dalam penelitiannya disebutkan bahwa hubungan merupakan sesuatu yang terjadi apabila dua orang ataupun dua hal/keadaan saling memengaruhi satu sama lain dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Hubungan juga dapat diartikan sebagai kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain (Al Sunah, 2019). Definisi hubungan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulanda & Sudrajat (2018) yaitu suatu keadaan saling terkait antara satu variabel dengan variabel lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip dalam penelitian Firdaus (2018) disebutkan bahwa hubungan adalah kontak atau ikatan atau pertalian (keluarga, persahabatan, dan sebagainya). Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses maupun cara yang menentukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu yang membawa dampak/pengaruh terhadap obyek lainnya (Wibowo, 2019). Hubungan juga memiliki pengertian berupa ikatan dan proses yang dapat membantu memudahkan segala kegiatan yang dilakukan agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan (Firdaus, 2018). Secara garis besar, hubungan terbagi menjadi hubungan positif dan hubungan negatif, di mana hubungan positif merupakan sebuah hubungan yang terjadi apabila pihak yang berinteraksi merasa saling diuntungkan satu sama lain yang ditandai dengan adanya timbal balik yang serasi, sedangkan hubungan negatif merupakan sebuah hubungan yang terjadi apabila salah satu pihak merasa sangat diuntungkan dan pihak lainnya merasa dirugikan (Al Sunah, 2019).

2.8 Sintesis Literatur

Sintesis literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan dan kerentanan, untuk lebih jelasnya akan dijabarkan pada tabel berikut:

TABEL II.1
SINTESIS LITERATUR

No	Literatur	Teori	Sumber	Variabel	Output
1	Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan	Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) digunakan untuk mengetahui kemampuan lahan yang terdiri dari: 1) SKL Morfologi, untuk memilah bentuk bentang alam/ morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. 2) SKL Kemudahan Dikerjakan, untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah dan/atau kawasan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/ pengembangan kawasan. 3) SKL Kestabilan Lereng, untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah/ kawasan pengembangan dalam menerima beban.	1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 2) Laiko (2010) 3) Wirawan, dkk. (2019)	1) SKL Morfologi 2) SKL Kemudahan Dikerjakan 3) SKL Kestabilan Lereng 4) SKL Kestabilan Pondasi 5) SKL Ketersediaan Air 6) SKL Untuk Drainase 7) SKL Terhadap Erosi 8) SKL Pembuangan Limbah 9) SKL Terhadap Bencana Alam	Sasaran 1: Teridentifikasinya Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan

No	Literatur	Teori	Sumber	Variabel	Output
		4) SKL Kestabilan Pondasi, untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan. 5) SKL Ketersediaan Air, untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada masing-masing tingkatan, guna pengembangan kawasan. 6) SKL Drainase, untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam memutuskan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal ataupun meluas dapat dihindari. 7) SKL Terhadap Erosi, untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antisipasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. 8) SKL Pembuangan Limbah, untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah,			

No	Literatur	Teori	Sumber	Variabel	Output
		baik limbah padat maupun limbah cair. 9) SKL Terhadap Bencana Alam, untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam untuk menghindari/mengurangi kerugian dan korban akibat bencana tersebut.			
2	Kerentanan	Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Peta kerentanan dapat dibagi-bagi ke dalam kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan ekologi/lingkungan.	1) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana 2) Jaswadi, dkk. (2012) 1) Nugroho & Rahayu (2019) 2) Wismarini & Sukur (2015)	1) Kerentanan Sosial 2) Kerentanan Ekonomi 3) Kerentanan Fisik 4) Kerentanan Lingkungan 1) Kerentanan Sosial 2) Kerentanan Ekonomi 3) Kerentanan Fisik	Sasaran 2: Teridentifikasinya Tingkat Kerentanan Bencana Banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan

Sumber: Peneliti, 2020